

B A B

2

Tantangan dan Problem Perkotaan di Saat Krisis

Rohani Budi Prihatin¹

I. Pendahuluan

Menurut data dari *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP),² pada tahun 1950 terdapat kurang dari sepertiga penduduk dunia tinggal dan hidup di perkotaan. Setengah abad kemudian, 50 persen dari total penduduk dunia tinggal di perkotaan. Proporsi ini akan terus meningkat menjadi tiga per empat pada tahun 2030 dan menjadi dua per tiga pada tahun 1950.³ Selanjutnya, dalam laporan tahunan UNESCAP tersebut disebutkan bahwa urbanisasi di kawasan Asia Pasifik

¹ Peneliti Muda bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

² www.unescap.org

³ UNESCAP, *Urbanisation and Health*, 2008, p.1.

mencapai tingkat yang tertinggi di dunia, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Walau terjadi proses urbanisasi yang pesat, namun pada sisi lain sebenarnya tingkat kemiskinan juga masih luar biasa tinggi di wilayah tersebut. Atau dalam kata lain, tingginya urbanisasi di satu sisi mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Namun di lain sisi mengakibatkan maraknya kemiskinan dan berbagai persoalan lainnya.

Berdasarkan data UNESCAP tersebut, tercatat pula jumlah penduduk miskin di kawasan Asia Pasifik mencapai hampir 700 juta jiwa.⁴ Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 juta jiwa digolongkan dalam tingkat kemiskinan ekstrim. Namun yang paling penting mencuat dari laporan tahunan ini adalah sebuah pertanyaan, mengapa di tengah laju pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik begitu cepat, angka kemiskinan masih juga luar biasa tinggi.

Jawabannya adalah karena diingkarinya sektor pertanian dan diabaikannya pembangunan pedesaan yang merupakan faktor utama dari kemiskinan dan urbanisasi itu. Sebetulnya sekitar 200 juta penduduk bisa meningkat taraf hidupnya dan diangkat dari kemiskinan jika saja secara konsisten dilakukan program peningkatan produktivitas pertanian. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan di Asia Pasifik memang didorong oleh kenyataan bahwa ekonomi negara-negara di kawasan itu terpusat pada industri dan jasa di kota-kota. Sementara sektor pertanian yang menjadi andalan ekonomi pedesaan dan juga menopang ekonomi perkotaan, tidak diperhatikan secara serius dan cenderung untuk diabaikan.

Masalahnya kemudian, sebagian besar kaum urban ini adalah tenaga yang tidak terdidik, yang di perkotaan mengadu hidup sebagai buruh kasar, dengan penghasilan yang pas-pasan. Karenanya mereka hanya mampu tinggal di kawasan kumuh,⁵ atau bahkan menciptakan kawasan-kawasan pemukiman kumuh yang baru, dengan berbagai permasalahannya sehingga jumlah warga yang tinggal di

⁴ United Nations: *World Urban Prospects*, 2001 Revision.

⁵ Berdasarkan data dari Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2004, terdapat sekitar 17 juta penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan kumuh. Lihat Harian *Kompas*, 18 Februari 2004.

kawasan kumuh meningkat dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, meningkatnya jumlah warga yang tinggal di kawasan kumuh ini tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan berbagai pelayanan dan kebutuhan dasar. Karenanya, penduduk yang tinggal di perkotaan makin lama justru makin mengalami permasalahan ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut laporan UNESCAP itu, dua dari tiap lima orang atau empat puluh persen penduduk kota tinggal di kawasan kumuh. Dan Indonesia, Cina dan Filipina adalah tiga negara yang mengalami anjloknya tingkat ketersediaan air bersih bagi warga kota. Tentu saja yang mengalami kelangkaan air bersih adalah kaum miskin kota.⁶

Selain faktor degradasi lingkungan, krisis perkotaan di Indonesia pada dewasa ini ditandai dengan beberapa hal seperti berikut: *pertama*, merosotnya kinerja ekonomi di perkotaan yang mengakibatkan gelombang PHK yang mencemaskan, sementara laju penanaman modal semakin menurun, daya beli masyarakat perkotaan turun dengan drastis, dan proporsi serta jumlah penduduk dan rumah tangga miskin semakin meningkat;⁷ *kedua*, dampak krisis ekonomi pada migrasi desa-kota masih belum jelas, apakah semakin membesar atau malah menurun, karena banyak pekerja yang terkena PHK umumnya kembali ke desa asalnya.

Di tengah situasi krisis semacam ini, maka perkembangan sosial ekonomi masyarakat perkotaan di Indonesia semakin hari semakin kompleks. Kenyataan sosial ini disebabkan oleh adanya fenomena mobilitas internasional, mobilitas antar desa-kota termasuk juga mobilitas musiman, antarwilayah (antarprovinsi) termasuk

⁶ Data dari Kementerian Lingkungan Hidup (2003) menyebutkan bahwa hanya ada 11 kota di Indonesia yang memiliki sistem sanitasi perpipaan terpusat dan hanya 13,9 persen penduduk yang mendapatkan akses terhadap sistem sewerege (pengolah air limbah). Lihat Harian *Pikiran Rakyat*, 22 Maret 2008.

⁷ Menurut pengamat ekonomi Aviliani, dampak krisis global baru akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dalam bentuk gelombang PHK antara bulan Januari-Maret 2009. Alasannya adalah karena pada periode tersebut banyak kontrak ekspor yang selesai, seperti di sektor garmen dan industri sepatu. Lihat Harian *Kompas*, 3 Desember 2008.

transmigrasi, dan pengungsi yang diakibatkan berkejolakannya situasi politik dan terganggunya kondisi keamanan pada berbagai tempat di Tanah Air. Mobilitas penduduk antar wilayah sebenarnya merupakan fenomena yang wajar sebagai reaksi perkembangan sosial-ekonomi, politik dan keamanan. Derasnya arus globalisasi membuat mobilitas penduduk tidak mungkin dicegah. Yang perlu dicermati adalah dampaknya baik yang positif maupun negatif, baik bagi daerah yang ditinggalkan maupun didatangi, dan untuk para migran sendiri beserta keluarganya, serta keseimbangan dalam pola serta laju-gerakannya.⁸

Perkembangan perkotaan di Indonesia yang sangat kompleks dan pesat tersebut ternyata di sisi lain juga memicu dampak yang tidak kecil. Bahkan, perkembangan ini juga tidak bisa lepas dari tuntutan era global. Sejak itu perkembangan kota telah menjalani dua metamorfosis yang signifikan, yaitu desentralisasi dan urbanisasi. Padahal, urbanisasi ini memicu dampak signifikan terhadap ancaman kerusakan lingkungan hidup dan kondisi ketidakseimbangan ekosistem.

Satu kelompok teoritis pembangunan wilayah berpendapat bahwa kesenjangan wilayah adalah suatu proses yang akan terjadi dan tidak dapat dihindari seiring dengan kemajuan dalam pembangunan sosial ekonomi negara, sampai kemudian menurun kembali dengan sendirinya setelah mencapai titik balik (*polarization reversal*).⁹ Hubungan antara kesenjangan wilayah dengan pendapatan per kapita pada suatu negara misalnya, sering dilukiskan sebagai kurva genta (*bell curve*). Kelompok teoritis yang lain berpendapat bahwa bagi negara berkembang dewasa ini tidak jelas kapan akan terjadinya titik balik tersebut, karena paradigma kurva genta adalah

⁸ Banyak pihak yang meyakini bahwa daya tarik kota sebenarnya sudah redup namun oleh karena didorong oleh semakin berkurangnya lahan pertanian di desa (khususnya di Pulau Jawa) dan sempitnya lapangan pekerjaan di desa mak migrasi ke perkotaan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lihat Ishak, *Urbanisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan*, *Humaniora* Vol. XIII, No. 3 Tahun 2001, p. 1.

⁹ J. F. Linn, "Urbanization Trends, Polarization Reversal and Spatial Policy in Columbia," dalam *Urban and Regional Report*, No. 79-15, The World Bank, 1979.

cermin sejarah negara-negara yang telah berkembang pada abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ini.

Kini negara-negara berkembang menghadapi kondisi sosial ekonomi global dan tantangan pembangunan nasional maupun regional yang jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh negara maju 50 tahun yang lalu. Adalah sangat sukar untuk menerima anggapan bahwa pengalaman negara yang telah berkembang dengan *polarization reversal*-nya akan berulang kembali di negara berkembang seperti Indonesia. Bukti baru bahkan menunjukkan pada suatu negara maju seperti Jepang ternyata mengalami pelebaran kesenjangan wilayah, antara metropolitan Tokyo dengan wilayah-wilayah (*perfectures*) lainnya di Jepang.

Sekelompok pakar lainnya yang mengamati perkembangan kota-kota besar berskala dunia (*global cities*) bahkan memperkirakan bahwa kesenjangan antara kota-kota besar ini dengan wilayahnya cenderung meningkat, karena kota-kota tersebut seolah-olah tercabut dari keterkaitannya dengan kota dan wilayah di negara yang bersangkutan, dan terintegrasi ke dalam sistem perekonomian global.¹⁰ Tulisan berikut ini akan memfokuskan pada permasalahan perkotaan yang terkait dampak psikologis kepadatan penduduk, urbanisasi, dan kemiskinan perkotaan.

II. Problem Kepadatan Penduduk (Dampak Psikologis)

Dalam buku “Nuansa Psikologi Pembangunan”, Djamiludin Ancok (1995) antara lain mengungkapkan bahwa masalah kepadatan penduduk menjadi salah satu ciri khas perkotaan. Secara umum, kelebihan penduduk ini menghadirkan berbagai permasalahan, mulai dari masalah kesehatan,

¹⁰ Henderson, J V, 1974. “ *The Sizes and Types of Cities,*” *American Economic Review*, American Economic Association, vol. 64 (4), September, p. 640-656.

masalah perumahan, transportasi publik, kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan masalah pelayanan sosial.¹¹ Satu hal yang pasti, kepadatan penduduk menyebabkan berkurangnya solidaritas sosial. Hasil-hasil penelitian mengenai perilaku menolong (*prosocial behavior*)¹² di perkotaan menunjukkan bahwa semakin padat penduduk di suatu wilayah maka akan semakin meningkat rasa tak peduli kepada orang lain. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan, kehidupan yang bercorak individualistik semakin terasa dari hari ke hari. Pagar atau tembok pembatas rumah yang makin tinggi menyebabkan hubungan sosial antartetangga menjadi semakin berkurang. Kepedulian terhadap sesama semakin menurun. Seakan-akan seseorang bertemu dengan orang lain bukan karena keinginan membina hubungan yang lebih intensif, melainkan hanya karena kebetulan bertemu atau karena terpaksa bertemu.

Memperkaya pernyataan di atas, Lilih Cholidah dkk. (1996), dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi "Psikologika"*, mengungkapkan bahwa ada hubungan yang positif antara kepadatan dan kesesakan dengan tingkat stres pada remaja Jakarta.¹³ Secara khusus, penelitian yang dilakukan di Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini mengungkapkan bahwa kepadatan dan kesesakan secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap terjadinya stres pada remaja sebesar 17 persen.

Hasil penelitian Lilih Cholidah dkk tersebut sejalan dengan pandangan Jain (1987) yang mengungkapkan bahwa stres mudah dialami individu yang mengalami keterbatasan ruang dan kesesakan setiap hari. Kepadatan dan kesesakan

¹¹ Djamaludin Ancok, *Nuansa Psikologi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

¹² Menurut Eisenberg dan Mussen, "*prosocial behavior refers to voluntary actions that are intended to help or benefit another individual or group of individuals.*" Lihat Nancy Eisenberg dan Paul H. Mussen, *The Root of Prosocial Behavior in Children*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

¹³ Lilih Cholidah dkk., dalam *Psikologika: Journal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia, 1996.

banyak mengakibatkan stres yang berhubungan dengan respon-respon psikis individu.¹⁴

Ciri lain dari pengembangan kota modern adalah dibangunnya gedung-gedung bertingkat. Pembangunan gedung-gedung bertingkat ini merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh semakin meluasnya tanah. Diungkapkan oleh ahli psikologi bahwa rumah susun mempengaruhi perilaku para penghuninya. Seberapa besar pengaruh tersebut sangat tergantung pada banyaknya jumlah lantai (*floor*), jumlah unit serta kelengkapan dan mutu fasilitas yang tersedia pada suatu rumah susun. Dalam suatu penelitian di Amerika Serikat, Bagley mengungkapkan bahwa penghuni rumah susun lebih banyak mengeluh tentang keadaan tempat tinggal mereka, merasa privasinya terganggu, merasa kurang tempat bermain bagi anak-anak, berkonsultasi karena tekanan kejiwaan, dan mengalami neurosis.¹⁵

Angka penelitian menunjukkan perbandingan keluhan penghuni rumah susun dan penghuni rumah biasa: mengeluh tentang keadaan rumah (48 persen - 27 persen), mengeluh kurang privasi (16 persen - 5 persen), mengeluh kurang tempat bagi anak untuk bermain (33 persen - 12 persen), berkonsultasi karena tekanan jiwa (37 persen - 16 persen), dan mempunyai skor neurotisme (14,11 persen - 11,81 persen).¹⁶

Rasa cemas dan takut terhadap tindakan kriminalitas salah satunya disebabkan oleh rancangan pemukiman penduduk yang kurang memenuhi persyaratan rasa aman. Rumah susun yang mempunyai lantai lebih dari enam dengan jumlah unit apartemen yang banyak, umumnya akan menimbulkan perasaan cemas terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas, khususnya bila ada tempat-tempat yang kurang mendapatkan pengawasan bersama.

¹⁴ Jain, U., *The Psychological Consequences of Crowding*, New Delhi, India: Sage, 1987.

¹⁵ Bagley, M.N., dan P. Mokhtarian, "The Impact of Residential Neighborhood Type on Travel Behaviour: a Structural Equations Modeling Approach", *Annals of Regional Science* 36, 2002, p.279-297.

¹⁶ Djamaludin Ancok, *op cit*

Salah satu contoh proyek rumah susun yang terpaksa dihancurkan karena ada perasaan takut di kalangan penghuninya terhadap kriminalitas adalah proyek perumahan rakyat Pruitt-Igoe, St Louis, Amerika Serikat. Kompleks perumahan ini terdiri atas 33 lantai dengan 2,800 apartemen modern. Desain perumahan ini telah mendapat hadiah dan penghargaan desain arsitektur yang baik. Namun karena kurang memperhitungkan aspek sosial-psikologis, kompleks perumahan ini terpaksa dihancurkan dalam tempo pemakaian kurang dari 20 tahun. Penyebab gagalnya kompleks perumahan untuk menarik para penghuni adalah tidak tersedianya tempat-tempat yang merupakan tempat berkumpul bersama. Taman, tempat rekreasi, tempat olahraga bersama, tempat parkir bersama di kompleks perumahan adalah tempat di mana orang saling berjumpa. Perjumpaan yang sering terjadi akan menyebabkan orang saling mengenal.

Membahas masalah ini, ada baiknya kita kutipkan hasil penelitian pengaruh rancangan asrama mahasiswa. Dalam buku *Social Psychology* karya David O Sears, Jonathan L Freedman, dan Letitia Anne Peplau (1991), diungkapkan bahwa ada dua rancangan asrama yang berbeda.¹⁷ Rancangan pertama berupa koridor (gang) yang sangat panjang yang terdiri atas kamar-kamar untuk satu atau dua orang, yang dilengkapi dengan ruang pertemuan dan kamar mandi yang dipakai bersama oleh semua penghuni.

Tipe kedua berupa sederetan ruang yang terdiri dari beberapa kamar tidur, yang terletak di sekeliling ruang duduk bersama, dilengkapi fasilitas kamar mandi yang biasanya dipakai bersama oleh penghuni kamar tidur tersebut. Jumlah ruang yang tersedia bagi tiap penghuni dari kedua desain ini kurang lebih sama. Hasil penelitian yang dilakukan Baum dan Valins (1977) menunjukkan bukti bahwa mahasiswa yang tinggal di asrama bertipe deretan lebih suka bergaul dan ramah.¹⁸

¹⁷ Jonathan L. Freedman, David O. Sears, and Letitia Anne Peplau, *Social Psychology*, (Hardcover - Jan 1988).

¹⁸ Andrew Baum dan Stuart Valins, "Residential Group Size, Social Interaction, and Crowding," dalam *Environment and Behavior*, Vol. 5, 1973, No. 4, p. 421-439.

Hal ini karena mereka menggunakan ruang duduk bersama, katakanlah sepuluh orang (masing-masing kamar tidur dua orang), mereka bisa lebih saling mengenal. Menurut penelitian Baum dan Valins tersebut, penghuni kamar berderet cenderung untuk duduk lebih dekat dan mengambil inisiatif pembicaraan yang banyak, dibandingkan penghuni kamar bergang. Sebuah tambahan, suatu penelitian pernah dilakukan tentang siapa di antara penghuni rumah susun yang paling dikenal. Penelitian itu mengungkapkan bahwa mereka yang tinggal di rumah susun yang posisi rumahnya dekat dengan tangga adalah yang paling dikenal dibanding mereka yang tinggal jauh dari tempat itu.

Pembicaraan tentang posisi rumah ini memang salah satu kajian menarik dalam psikologi lingkungan. Diungkapkan bahwa posisi rumah berkaitan dengan popularitas seseorang. Orang-orang yang tinggal di lokasi yang dekat dengan tempat pelayanan umum, biasanya lebih dikenal dibandingkan dengan mereka yang berada jauh dari tempat pelayanan umum. Tempat tinggal yang dekat dengan kantor pos, kantor pajak, pasar, adalah tempat yang setiap saat dilewati orang-orang yang berkepentingan dengan tempat-tempat pelayanan umum itu.

III. Problem Urbanisasi (Dampak Demografis)

Urbanisasi sebenarnya merujuk pada suatu proses dimana terjadi pertambahan proporsi dari seluruh penduduk yang tinggal di perkotaan dan pinggiran kota. Menurut sejarahnya, urbanisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan proses industrialisasi.¹⁹ Hal itu terjadi ketika seluruh sumber daya alam yang tersedia digunakan untuk meningkatkan

¹⁹ Lewis Mumford, "The Natural History of Urbanization", dalam William L. Thomas (ed.), *Man's Role in the Changing the Face of the Earth*, Chicago & London: University of Chicago Press, 1956.

produktivitas manusia (industrialisasi), maka terjadi penambahan atau surplus baik di bidang pertanian maupun industri. Akibatnya, proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan semakin bertambah dan bertambah lagi. Pertambahan penduduk yang menetap di perkotaan setidaknya didorong karena kekuatan-kekuatan ekonomi yang berkembang biasanya menjadikan perkotaan menjadi tempat yang ideal untuk menempatkan pabrik dan pekerja.

Dalam beberapa dekade yang lalu, urbanisasi dan perkembangan kota berkembang dengan sangat cepat, khususnya di beberapa negara berkembang. Pada tahun 1950, jumlah penduduk dunia yang tinggal di wilayah desa masih sekitar 70 persen, dan sisanya 30 persen menetap di kota. Pada tahun 1970, naik menjadi 37 persen penduduk dunia yang hidup di perkotaan. Pada tahun 1980, jumlah penduduk dunia yang tinggal di kota meningkat menjadi sekitar 40 persen. Pada tahun 1995 proporsi ini menjadi 45 persen, dan kemudian berubah lagi melewati 50 persen pada tahun 2005. Bahkan pada 2015 nanti, diprediksi jumlah penduduk yang tinggal di kota sudah lebih besar dibandingkan penduduk yang menetap di desa yaitu 60 persen berbanding 40 persen (UN: 2008).²⁰

Urbanisasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti, sehingga kecenderungan semakin meluasnya problema sosial ekonomi di berbagai kota di Indonesia dapat mengakibatkan problema nasional dan menjadi masalah sosial bagi negara Indonesia. Dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkannya, penanganan masalah urbanisasi yang tinggi di kota besar di Indonesia, sudah seharusnya menjadi bagian dari kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan pertambahan penduduk yang terlampau cepat seperti kota-kota besar di Pulau Jawa telah menimbulkan persoalan tersendiri berkaitan dengan penyediaan berbagai fasilitas serta kualitas lingkungan hidup.²¹

²⁰ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *World Urbanization Prospects: The 2007 Revision*, New York: 2008, p. 1. Lihat juga Ahmad Erani Yustika, "Desain Ekonomi Desa dan Kota", dalam *Koran Sindo*, tanggal 4 Februari 2008.

²¹ Luas Pulau Jawa adalah 132.187 km² atau 6,9 persen daratan Indonesia. Namun jumlah penduduknya sekitar 60 persen dari total penduduk

Kota Jakarta, misalnya, pada saat ini telah menjadi salah satu dari 23 *megacities* di dunia oleh karena berpenduduk di atas 10 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat itu, berhadapan dengan terbatasnya sumber daya alam dan sumber daya buatan, seperti air bersih, perumahan, sanitasi lingkungan, tempat pembuangan sampah, dan pelayanan kesehatan. Dari aspek lingkungan, pemakaian air tanah yang berlebihan menyebabkan penurunan muka air tanah dengan sangat cepat dan di beberapa tempat menyebabkan penurunan tanah, serta intrusi air laut sampai jauh ke darat. Hal ini membuktikan bahwa pesatnya laju urbanisasi di suatu wilayah akan semakin memburuk kualitas lingkungan hidup, yang antara lain terlihat dari kehidupan di kawasan kumuh yang semakin parah, meningkatnya limbah rumah tangga, dan pencemaran udara.

Sebenarnya, masalah arus migrasi dari pedesaan ke perkotaan, bukan hanya masalah Jawa saja, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan daerah-daerah luar Jawa. Sehingga upaya menekan arus migrasi harus dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah. Hal ini berarti bahwa fasilitas-fasilitas yang biasa dinikmati penduduk perkotaan ke depan perlu disebar ke pedesaan. Dengan cara ini maka penduduk pedesaan yang berniat migrasi ke perkotaan karena ingin menikmati fasilitas urban, akan membatalkan niatnya dan tetap tinggal di desanya.

Oleh karena masalah arus migrasi bukan hanya masalah di Pulau Jawa, maka kebijakan menekan arus migrasi harus merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional.²² Konsekuensinya provinsi dan kabupaten yang berada diluar Jawa perlu dilibatkan mengurangi arus migrasi, melalui suatu kebijakan untuk “mengurbankan”

Indonesia. Hal ini berarti kepadatan penduduk di Jawa adalah 813 orang/km². Lihat Harian *Kompas*, “Beban Jawa Amat Berat”, 15 Maret 2008.

²² Menurut John Salt, permasalahan migrasi jauh lebih besar daripada persoalan perubahan alamiah kependudukan. Hal ini dikarenakan permasalahan migrasi secara langsung berdampak pada perubahan ukuran angkatan kerja, perencanaan investasi pemerintah, alokasi dana untuk daerah, dan otoritas daerah dalam hal permukiman. Lihat selengkapnya “*Interview: Professor John Salt-International Migration Expert*”, data diakses tanggal 10 Februari 2009 di www.rgs.org.

daerah perdesaan melalui penyebaran pembangunan fasilitas-fasilitas perkotaan. Untuk itu, penyusunan tata ruang pembangunan masing-masing daerah, harus mengacu pada tata ruang nasional.

Pengertian urbanisasi sebenarnya sudah umum diketahui oleh mereka yang banyak bergelut di bidang kependudukan, khususnya mobilitas penduduk. Namun demikian, bagi mereka yang awam dengan ilmu kependudukan sering kali kurang tepat dalam memakai atau memaknai istilah tersebut. Dalam pengertian yang sesungguhnya, urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan bagi mereka yang awam dengan ilmu kependudukan seringkali mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Padahal perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan hanya salah satu penyebab proses urbanisasi, di samping penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, perluasan wilayah, maupun perubahan status wilayah dari daerah perdesaan menjadi daerah perkotaan, dan semacamnya itu.

Proses urbanisasi sangat terkait mobilitas maupun migrasi penduduk. Ada sedikit perbedaan antara mobilitas dan migrasi penduduk. Mobilitas penduduk didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas kabupaten atau kota, namun tidak berniat menetap di daerah yang baru. Sedangkan migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas kabupaten atau kota dan sekaligus berniat menetap di daerah yang baru tersebut. Di dalam pelaksanaan perhitungannya, data BPS yang ada sampai saat ini baru merupakan data migrasi penduduk dan bukan data mobilitas penduduk. Di samping itu, data migrasi pun baru mencakup batasan provinsi saja. Dengan demikian, seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jika provinsi tempat tinggal orang tersebut sekarang ini, berbeda dengan provinsi dimana yang bersangkutan dilahirkan. Selain itu seseorang dikategorikan sebagai migran risen jika provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Oleh karena itu, pemerintah di samping mengembangkan kebijaksanaan pengarahannya

dan mobilitas penduduk, termasuk di dalamnya urbanisasi, juga berkewajiban menyempurnakan sistem pencatatan mobilitas dan migrasi penduduk agar kondisi data yang ada lebih sesuai kondisi di lapangan. Terutama bila diperlukan untuk perumusan suatu kebijakan kependudukan.

Di masa mendatang, para ahli kependudukan memperkirakan bahwa proses urbanisasi di Indonesia akan lebih banyak disebabkan oleh migrasi desa-kota. Perkiraan ini didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan status dari daerah perdesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang "urban bias", sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di daerah perdesaan.

Itulah sebabnya di masa mendatang, isu urbanisasi dan mobilitas atau migrasi penduduk menjadi sulit untuk dipisahkan dan akan menjadi isu yang penting dalam kebijaksanaan kependudukan di Indonesia. Jika di masa lalu dan dewasa ini, isu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) masih mendominasi kebijaksanaan kependudukan, di masa mendatang manakala tingkat kelahiran dan kematian sudah menjadi rendah, ukuran keluarga menjadi kecil, dan sebaliknya kesejahteraan keluarga dan masyarakat meningkat, maka keinginan untuk melakukan mobilitas bagi sebagian besar penduduk akan semakin meningkat dan terutama yang menuju daerah perkotaan.

Jika pada tahun 1980 migran di Indonesia berjumlah 3,7 juta jiwa, maka angka tersebut meningkat menjadi 5,2 juta jiwa pada tahun 1990 dan kemudian sedikit menurun menjadi 4,3 juta jiwa pada periode 1990-1995. Secara kumulatif dapat diketahui bahwa sampai tahun 1980, jumlah penduduk Indonesia yang pernah melakukan migrasi adalah 11,4 juta jiwa, sedangkan pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 17,8 juta jiwa. Lebih lanjut, data survei penduduk antarsensus (Supas) 1995 memperlihatkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 1995 adalah 35,91 persen yang berarti bahwa 35,91 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Tingkat ini telah meningkat dari sekitar 22,4 persen pada tahun 1980 yang lalu.

Sebaliknya proporsi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan menurun dari 77,6 persen pada tahun 1980 menjadi 64,09 persen pada tahun 1995.

Meningkatnya proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnya urbanisasi di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan.

Di sini dapat dilihat adanya keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi dengan konsentrasi penduduk. Para pelaku ekonomi cenderung melakukan investasi di daerah yang telah memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Hal ini dikarenakan dapat menghemat berbagai biaya, antara lain biaya distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, penduduk akan cenderung datang kepada pusat kegiatan ekonomi karena di tempat itulah umumnya mereka akan lebih mudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

Jika urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar, mengapa proses urbanisasi tetap harus dikendalikan atau diarahkan? Ada dua alasan mengapa urbanisasi perlu diarahkan. *Pertama*, pemerintah berkeinginan untuk sesegera mungkin meningkatkan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa meningkatnya penduduk daerah perkotaan akan berkaitan erat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. Data memperlihatkan bahwa suatu negara atau daerah dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi, juga memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Negara-

negara industri pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 persen. Bandingkan dengan negara berkembang yang sekarang ini. Tingkat urbanisasinya masih sekitar 35 persen sampai dengan 40 persen saja.

Kedua, terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan, atau tidak terkendali, dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada penduduk itu sendiri. Ukuran terkendali atau tidaknya proses urbanisasi biasanya dikenal dengan ukuran *primacy rate*, yang kurang lebih dapat diartikan sebagai kekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu negara atau wilayah terhadap kota-kota di sekitarnya. Makin besar tingkat *primacy*-nya maka menunjukkan keadaan yang kurang baik dalam proses urbanisasi kota tersebut. Sayangnya data mutakhir mengenai *primacy rate* di Indonesia tidak tersedia.

Selama ini, fenomena urbanisasi di perkotaan dikaji dari berbagai disiplin ilmu antara lain demografi, ekonomi, dan sosiologi. Dari segi demografi, urbanisasi merupakan proses perubahan penyebaran penduduk dalam suatu wilayah. Masalah-masalah mengenai kepadatan penduduk di perkotaan umumnya berakibat lanjut terhadap masalah pemukiman penduduk, kelebihan tenaga kerja, dan pada akhirnya dapat menghambat pembangunan. Dari sisi ekonomi, urbanisasi merupakan perubahan struktural dalam sektor mata pencaharian penduduk. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk desa yang meninggalkan pekerjaannya di bidang pertanian, kemudian beralih untuk bekerja menjadi buruh atau pekerja kasar yang sifatnya non agraris di kota.

Dari sisi sosiologi, urbanisasi seringkali dikaitkan dengan sikap hidup penduduk dalam lingkungan perdesaan yang kemudian mendapat pengaruh dari kehidupan kota. Dalam hal ini masyarakat mengalami kebimbangan apakah mereka dapat bertahan pada cara hidup desa ataukah mereka mengikuti arus cara hidup orang kota yang belum mereka kenal secara mendalam, sehingga akan dapat, menimbulkan masalah-masalah sosiologis yang baru. Dari segi sosiologi, urbanisasi dapat menimbulkan lapisan sosial yang baru dan menjadi beban kota, karena kebanyakan dari mereka yang tidak berhasil hidup layak di kota dan akan menjadi pengangguran atau gelandangan yang pada

akhirnya membentuk daerah kumuh atau daerah hunian liar.

IV. Kemiskinan Perkotaan (Dampak Ekonomis)

Dalam bukunya "*Development as Freedom*", Amartya Sen mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan kemampuan dasar seseorang sehingga tidak dapat bebas untuk memilih kehidupan sebagaimana yang dikehendaki.²³ Kemampuan-kemampuan dasar tersebut antara lain kondisi kesehatan yang baik, pendidikan, jaringan sosial, kepemilikan atas sumber-sumber ekonomi, dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan seseorang.

Menurut Sen, pendapatan seseorang adalah penting karena dengan uang akan membuat seseorang mengembangkan kemampuannya, akan tetapi uang tersebut hanyalah sarana untuk hidup. Dari perspektif ini, kemiskinan merupakan suatu kondisi dengan begitu banyak hal yang saling terkait dan sangat dekat terhubung dengan dimensi-dimensi yang dapat dirangkum dalam tiga kategori luas, yaitu:

- a. kurangnya pendapatan yang tetap dan pekerjaan, aset produktif seperti tanah dan perumahan, dan akses kepada jaring pengaman sosial;
- b. kurangnya akses untuk pelayanan seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, informasi, kredit, air bersih dan sanitasi.
- c. kurangnya kekuatan politik, partisipasi, harga diri dan respek.

Dalam wacana kemiskinan perkotaan, Ellen Wratten menyatakan terdapat tiga hal pokok yang harus menjadi

²³ Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford University Press, 1999, p. 2.

perhatian dan isu bersama.²⁴ Pertama, bagaimana dan oleh siapa kemiskinan perkotaan didefinisikan, serta bagaimana cara kita mengukur tingkat kemiskinan tersebut? Berikutnya, Wratten mempertanyakan apa perbedaan kemiskinan perkotaan dengan kemiskinan secara umum, apa bedanya dengan kemiskinan di perdesaan misalnya? terakhir adalah bagaimana prinsip prinsip kemiskinan perkotaan dipahami, dari sisi wilayah serta dari sisi kebijakan penanggulangannya.

Dilihat dari sudut pandang geografis dan dari sisi ekonomi, antara tahun 1980an hingga 1990an, peningkatan kemiskinan terjadi secara drastis di wilayah perkotaan. Peningkatan kemiskinan di perkotaan terjadi akibat tingginya angka urbanisasi. Dalam dua dekade mendatang, populasi manusia yang hidup di wilayah perkotaan akan mengambil alih konsentrasi populasi yang selama ini tinggal di wilayah perdesaan untuk yang pertama kalinya. Dengan terjadinya urbanisasi yang demikian pesat, maka angka kemiskinan di perkotaanpun diperkirakan akan meningkat dengan cepat.

Pendapat umum menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan atau ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar untuk mencapai kebahagiaan. Meskipun pendapat tersebut sudah diterima secara luas, namun masih sangat sulit dan sangat subjektif sifatnya untuk menentukan kebutuhan dasar manusia dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Apakah setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan seseorang telah bahagia? Akibat sulitnya pendefinisian tersebut, maka masing masing kelompok masyarakat diperkenankan untuk menentukan sendiri definisi kebutuhan hidupnya serta mengukur tingkat kemiskinannya.

Dari beberapa kajian, setidaknya ada 4 (empat) definisi mengenai kemiskinan yaitu definisi kemiskinan konvensional, definisi kemiskinan absolut dan relatif, definisi kemiskinan berdasarkan indikator sosial, dan definisi *participatory* (berdasarkan tingkat kerapuhan/vul-

²⁴ Ellen Wratten, "Conceptualizing Urban Poverty" dalam *Journal of Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, 1995, p. 11-38.

nerability dan kepemilikan). Berdasarkan definisi konvensional, kemiskinan diukur berdasarkan sisi pendapatan dan pengeluaran. Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang dapat diukur melalui tingkat pendapatannya. Dalam kehidupan sehari-hari pendapatan dan pengeluaran, kerap kali dipakai sebagai tolok ukur untuk menentukan atau mendefinisikan kesejahteraan. Kurangnya pendapatan dikaitkan secara langsung sebagai penyebab kemiskinan dan penderitaan. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatan yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang dipersyaratkan untuk dapat hidup.

World Bank dalam laporan *World Development Report* menggunakan dua patokan pendapatan standar untuk mendefinisikan kemiskinan. Seseorang dengan pendapatan perkapita di bawah USD 370 per tahun dinyatakan miskin, dan yang pendapatannya di bawah USD 275 per tahun, dinyatakan sangat miskin. Dalam tahun 1994 1,39 miliar penduduk dunia dinyatakan tergolong sebagai penduduk miskin. Di beberapa negara, data pendapatan dan pengeluaran digunakan untuk mengukur “orang miskin baru”, “orang dalam garis kemiskinan” serta “orang sangat miskin”, dimana kondisi ini sudah terjadi semenjak belum ditetapkannya kategori kemiskinan.

Sementara itu, jika kemiskinan akan didefinisikan secara absolut, maka kebutuhan dasar manusia harus pula didefinisikan secara absolut dan *fixed*, antara lain kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pelayanan (*services*), antara lain air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan serta transportasi. Definisi absolut ini biasanya digunakan oleh World Bank atau pemerintah dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. Pendefinisian absolut ini mengabaikan faktor perubahan pendapatan serta perubahan kebutuhan mendasar yang umumnya makin meningkat.

Sebaliknya, konsep atau definisi relatif bersifat lebih fleksibel. Kebutuhan minimum dapat disesuaikan dengan kondisi faktual masyarakat dan standar hidup seseorang dapat pula disesuaikan dengan faktor waktu misalnya sebagai bahan pertimbangan. Menurut Peter Townsend (1993), kemiskinan secara relatif didefinisikan sebagai berikut:

*“the conditions of life - that is the diets, amenities, standards, and services - which allow them to play the roles, participate in the relationships and follow the customary behaviour which is expected of them by virtue of their membership of society”.*²⁵

Jika definisi ini dipakai, maka akan ditemui lebih banyak kemiskinan di New York, London atau Tokyo dibandingkan di New Delhi, Beijing, atau bahkan di Denpasar, karena kemiskinan sangat bersifat relatif. Akan tetapi jika menggunakan standar dari kemiskinan dari Bank Dunia, maka hanya beberapa gelandangan di kota London saja yang akan tergolong miskin, karena jaminan sosial bagi pengangguran di London berada di atas ambang kemiskinan versi World Bank.

Pada sisi lain, banyaknya faktor yang mempengaruhi sulitnya mendefinisikan kemiskinan dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka sosial indikator sering dipakai sebagai tolok ukur tambahan. Beberapa indikator sosial yang sering dipakai sebagai indikator atau tolok ukur kemiskinan antara lain: umur hidup (*life expectancy*), kematian bayi, asupan gizi, proporsi pendapatan yang dipakai untuk membeli makanan, tingkat pendidikan, akses kesehatan dan ketersediaan serta kebersihan air minum.

Begitu banyaknya indikator yang dipakai sebagai tolok ukur untuk mendefinisikan kemiskinan, seperti laporan World Bank yang berjudul *“World Development Report”*, maka variabel yang berbeda mungkin menyatakan berbagai konflik kepentingan tentang pola-pola perebutan simpati atau kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, pendapatan dan pengeluaran lebih sering dipakai sebagai patokan utama bagaimana kemiskinan didefinisikan.

Untuk memecahkan masalah pendefinisian kemiskinan, beberapa variabel utama dicoba untuk dijadikan sebagai variabel pokok. *Human Development Index* yang dikeluarkan oleh UNDP, menggunakan variabel pendapatan, angka buta huruf dan jangka waktu hidup (*life*

²⁵ Peter Townsend, *The International Analysis of Poverty*, London: Prentice-Hall, 1993, p.10.

expectancy) sebagai tolok ukur tunggal dalam penentuan standar hidup dengan faktor nilai antara skala 0 sampai 1. Contoh-contoh lain menyertakan *Physical Quality of Life Index*, *the Food Security Index*, dan *Relative Welfare Index*. Semua tolok ukur tersebut bukanlah sesuatu yang pasti. Lebih jauh, mereka mengukur kemiskinan dari sisi luar dan tidak dari sisi orang miskin itu sendiri.

Selain itu, ada pula ahli yang mendefinisikan kemiskinan dari sisi *participatory* (kerapuhan atau *vulnerability* dan kepemilikan). Kerapuhan atau *vulnerability* tidaklah sama dengan kemiskinan. Kerapuhan didefinisikan sebagai ketidakberdayaan, rasa tidak aman, terbuka terhadap ancaman dan risiko, *shock* dan *stress*. Kerapuhan berhubungan langsung dengan aset dasar seperti kesehatan, pendidikan, aset produktif seperti rumah dan perlengkapannya, akses ke pelayanan umum, simpanan uang, perhiasan. Sementara kemiskinan akibat kurangnya pendapatan bisa diatasi dengan cara meminjam, tetapi dengan memiliki utang maka orang yang miskin akan semakin berada dalam kondisi yang rapuh. Titik kritis di mana orang miskin memiliki rasa takut terlilit utang menjadikan permasalahan kemiskinan dan kerapuhan semakin rumit.

Dalam konteks yang lebih luas lagi, keempat definisi tersebut juga terkait dengan permasalahan kemiskinan perkotaan. Menurut sejarah, literatur tentang pembangunan memfokuskan pembahasan pada ketidakseimbangan antara wilayah desa yang miskin dengan wilayah perkotaan yang lebih kaya, serta hubungan antara urbanisasi sebaran modal dan kemiskinan.

Bias masalah perkotaan menjadi tema pembicaraan pokok diantara agen pembangunan tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Di banyak negara di dunia ketiga, program pengentasan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup di perdesaan tertinggal. Pertengahan tahun 1980-an penyesuaian dilakukan dengan memberikan subsidi bagi penduduk perkotaan dan meningkatkan harga harga untuk meningkatkan produksi di perdesaan.

Di kota-kota industri Eropa dan Amerika, mayoritas penduduk (termasuk juga golongan miskin) hidup di perkotaan semenjak awal abad kedua puluh. Konsekuensi

dari kondisi ini adalah, kemiskinan perkotaan dan riset mengenai konsep kemiskinan perkotaan telah pula berlangsung sejak awal abad kedua puluh tersebut. Akibat besarnya peran *image* perkotaan, maka definisi kemiskinan perkotaan sering dianggap tidak sama dengan definisi kemiskinan secara umum. Padahal secara esensi sama saja.

V. Kesimpulan

Secara umum, problem perkotaan dimulai dengan adanya proses urbanisasi dan migrasi penduduk dari desa ke kota. Hal ini diakibatkan karena proses pembangunan yang bias perkotaan sehingga umumnya perkotaan diserbu oleh pendatang yang menetap ataupun musiman. Akibat arus migrasi yang tidak terkontrol, maka mulailah muncul berbagai masalah di perkotaan. Di antara masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah problem psikologis akibat kepadatan penduduk, problem demografis akibat urbanisasi, dan problem kemiskinan perkotaan.

Fenomena urbanisasi di kota-kota besar di Indonesia tampaknya terus menunjukkan gejala meningkat, dan motivasi perpindahan itu umumnya untuk mencari pekerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di luar perkotaan, khususnya di pedesaan, semakin terbatas. Padahal realitasnya kesempatan kerja di kota-kota besar juga terbatas. Namun, mengingat skala kegiatan ekonomi yang sangat luas di perkotaan, terutama di sektor informal, diperkirakan peluang kesempatan kerja bisa diciptakan sendiri.

Masalah utama yang ditimbulkan akibat urbanisasi antara lain ada pada aspek ketertiban dan keamanan. Masalah itu muncul umumnya karena kesenjangan yang sangat ekstrem, terkait dengan kondisi sosial-ekonomi penduduk, sehingga tak jarang kesenjangan itu menimbulkan konflik, baik horizontal maupun vertikal. Masalah keamanan itu juga terjadi dalam memperebutkan

akses, khususnya dalam lapangan pekerjaan. Kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan akan sangat mudah memancing tindakan kriminal.

Sementara itu, dari aspek infrastruktur, masalahnya timbul karena kemampuan pemerintah yang belum cukup memadai dalam penyediaan dan pemeliharannya. Berbagai infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perumahan, air bersih, lampu penerangan, sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi, membutuhkan dana yang sangat besar. Di sisi lain, perluasan fasilitas infrastruktur memerlukan ruang (*space*), dan pemenuhannya sangat sulit dilakukan mengingat sempitnya lahan di perkotaan. Tak jarang dalam pemenuhan *space* itu terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Atas dasar pertimbangan di atas, tak ada jalan selain melakukan redistribusi pembangunan. Diakui saat ini ada kesenjangan tingkat kesejahteraan yang sangat tajam antara desa dan kota. Ini antara lain terindikasi dengan angka kemiskinan. Pada 2004, misalnya, angka kemiskinan di perkotaan sekitar 12,13 persen, sementara di pedesaan sekitar 21,11 persen. Jadi terdapat perbedaan angka kemiskinan desa-kota hampir 9 persen.

Tingginya angka kemiskinan di pedesaan sangat terkait dengan keberadaan sektor pertanian, sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yang ternyata semakin tidak bisa diharapkan untuk memberikan insentif bagi penduduk. Ini antara lain disebabkan oleh terkungkungnya petani di antara dua kutub, yaitu kutub produksi dan kutub hasil penjualan. Pada kutub produksi, petani terjepit dengan semakin meningkatnya biaya yang dikeluarkan terutama untuk upah buruh, pupuk, dan pestisida. Sedangkan pada kutub hasil penjualan, petani tidak punya kekuatan (*bargaining power*) untuk meningkatkan harga produk mereka. Sehingga margin keuntungan menjadi tidak seberapa, bahkan kadang lebih kecil daripada upah buruh, atau malah menjadi minus sehingga petani merugi.

Maka, dengan melihat berbagai kenyataan itu, sepatutnya pemerintah semakin berfokus pada pembangunan di pedesaan agar tidak semakin tertinggal. Terbaikannya sektor pertanian antara lain karena kita tidak

cukup serius dalam melakukan pembenahan. Program revitalisasi pertanian hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Bahkan beberapa pengamat menyebutkan penancangan revitalisasi itu hanya sekadar wacana, yang tidak diikuti dengan rencana tindak lanjut secara jelas. Padahal, ketika revitalisasi itu dikumandangkan setahun lalu, banyak pihak yang optimistis itu merupakan salah satu rencana besar (*grand design*) pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Sebab, revitalisasi atas ketiga sektor itu pada gilirannya akan lebih memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati nilai tambah atas partisipasi mereka.

Kita semua berharap revitalisasi itu dapat menjadi momentum dalam mengatasi kemiskinan, mengingat lebih dari dua pertiga penduduk menggantungkan hidup pada sektor-sektor yang direvitalisasi. Konkretnya, ketiga sektor dimaksud teridentifikasi sebagai kantong kemiskinan. Sehingga keberhasilan dalam revitalisasi atas ketiga sektor itu setidaknya telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bagi lebih dari dua pertiga total penduduk.

Keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan, pada gilirannya akan berpengaruh positif bagi penduduk untuk tetap menetap di pedesaan. Komitmen ini setidaknya bisa dibuktikan pada saat Lebaran tahun-tahun mendatang. Jika saja penduduk yang pindah ke Jakarta semakin berkurang pada kurun waktu mendatang, itu bisa ditafsirkan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam revitalisasi pertanian. Segi positif lain dari keberhasilan itu, kita dapat berswasembada pangan, sehingga hal itu sinkron dengan identitas Indonesia sebagai salah satu negara agraris.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ancok, Djameludin, *Nuansa Psikologi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Bagley, M.N., dan P. Mokhtarian, "The Impact of Residential Neighborhood Type on Travel Behaviour: a Structural Equations Modeling Approach", *Annals of Regional Science* 36, 2002, p. 279-297.
- Eisenberg, Nancy dan Paul H. Mussen, *The Root of Prosocial Behavior in Children*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Freedman, Jonathan L., David O. Sears, and Letitia Anne Peplau, *Social Psychology*, (Hardcover - Jan 1988).
- Jain, U., *The Psychological Consequences of Crowding*, New Delhi, India: Sage, 1987.
- Mumford, Lewis, "The Natural History of Urbanization", dalam William L. Thomas (ed.), *Man's Role in the Changing the Face of the Earth*, Chicago & London: University of Chicago Press, 1956.
- Sen, Amartya, *Development as Freedom*, Oxford University Press, 1999.
- Townsend, Peter, *The International Analysis of Poverty*, London: Prentice-Hall, 1993, p.10.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *World Urbanization Prospects: The 2007 Revision*, New York: 2008, p. 1.

Jurnal:

- Baum, Andrew dan Stuart Valins, "Residential Group Size, Social Interaction, and Crowding," dalam *Environment and Behavior*, Vol. 5, 1973, No. 4, p. 421-439.
- Cholidah, Lilih dkk., dalam *Psikologika: Journal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Henderson, J V, 1974. "The Sizes and Types of Cities," *American Economic Review*, American Economic Association, vol. 64 (4), September, p. 640-656.
- "Interview: Professor John Salt-International Migration Expert", data diakses tanggal 10 Februari 2009 di www.rgs.org.
- Ishak, Urbanisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan, *Humaniora* Vol. XIII, No. 3 Tahun 2001.

Linn, J. F. "Urbanization Trends, Polarization Reversal and Spatial Policy in Columbia," dalam *Urban and Regional Report*, No. 79-15, The World Bank, 1979.

UNESCAP, Urbanisation and Health, 2008.

United Nations: *World Urban Prospects*, 2001 Revision

Wratten, Ellen, "Conceptualizing Urban Poverty" dalam *Journal of Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, 1995, p. 11-38.

Koran:

Ahmad Erani Yustika, "Desain Ekonomi Desa dan Kota", dalam *Koran Sindo*, tanggal 4 Februari 2008.

Harian *Kompas*, 18 Februari 2004.

Harian *Pikiran Rakyat*, 22 Maret 2008.

Harian *Kompas*, 3 Desember 2008.

Harian *Kompas*, "Beban Jawa Amat Berat", 15 Maret 2008.